

# Administrasi dan Asset Diberi Catatan BPK

## Pontianak, BERKAT.

Berdasarkan hasil audit sementara BPK, Pemerintah kota Pontianak tidak memiliki kewajiban mengembalikan uang ke kas daerah. Ini diungkapkan Wali Kota Pontianak Sutarmidji, SH, M.Hum, belum lama ini. "Setelah di audit, kita tidak harus mengembalikan uang ke kas daerah. Ini hasil audit resmi BPK," katanya.

Ia mengatakan semakin tahun pihaknya memang menargetkan pencapaian audit BPK yang meningkat.

"Itu target pencapaian kita, karena kita optimis dan yakin peningkatan bisa dilakukan, dan hasilnya bisa dibuktikan. Masalah ini sangat rentan salah, makanya kita mencoba membekali SDM kita dalam

menulis laporan keuangan, begitu juga masalah penggunaan anggaran kita ke luaran untuk hal yang prioritas dan tepat sasaran, sehingga tidak ada anggaran yang mubazir," ujarnya.

Diakuinya orang nomor satu di Kota Pontianak ini, hasil audit sementara BPK ini hanya terdapat catatan mengenai persoalan administrasi dan aset.

"Ini pencapaian yang baik sekali, dan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Bila perlu tidak ada lagi catatan dari BPK, dan kita mendapat hasil yang memuaskan dalam penulisan laporan. Peningkatan akan terus kita lakukan, diperbaiki apa yang kurang dan kita coba yang terbaiklah," terangnya.

Pencapaian ini diakuinya memang

didukung dari jajaran SKPD. Pihaknya sudah seringkali menyampaikan kepada jajaran SKPD agar membuat catatan atau laporan keuangan secara benar, jujur dan transparan.

"Kita ingin SKPD bekerja maksimal, ini bisa dilihat dari pencapaian yang diungkap BPK ini. Makanya, kita minta seluruh instansi yang ada benar-benar teliti dalam menulis laporan, begitu juga dengan membuat kegiatan harus sesuai program dan rencana yang sudah disusun, bila perlu mampu menghemat anggaran dan program bisa berjalan maksimal," paparnya.

Hal ini secara tegas sudah ditunjukkan dengan komitmen tinggi pemerintahannya

dalam beberapa hal.

Ia pun kembali meminta seluruh SKPD menghindari penyimpangan anggaran.

"Kita minta jangan ada yang coba-coba menyimpang dari anggaran, karena kita akan tahu nantinya, jika memang ada program yang tidak ada diadakan, yang otomayis mnekan anggaran," tegasnya. Sutarmidji pun berharap jajarannya semakin mampu menguasai pembuatan neraca atau laporan keuangan.

"Saya minta ke depan jajaran di pemerintahan ini nantinya bisa menguasai dan mempersiapkan diri menghadapi audit elektronik BPK. Kita harus siap karena ini penting bagi pencapaian daerah," ujarnya. (wfi)